

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH
PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI
SEKTOR USAHA KECIL DAN MIKRO**



Oleh

BADRUL AINI

NIM. 2120215310019

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH
PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR
USAHA KECIL DAN MIKRO**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh

BADRUL AINI

NIM. 2120215310019

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2023

**Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Perempuan Yang Bekerja
di Sektor Usaha Kecil dan Mikro**

Nama : Badrul Aini
NIM : 2120215310019

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Suprpto, S.H., .M.H
NIP. 19810517 200501 100 1

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal...~~2..7..JUL..~~ 2023

Pembimbing utama



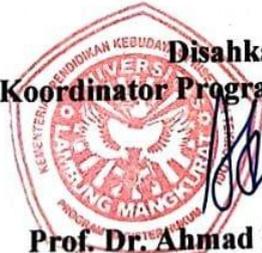
Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Suprpto, S.H., .M.H
NIP. 19810517 200501 100 1

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal., S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal... 27 JUL 2023.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota : 1. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
: 2. Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
: 3. Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Badrul Aini
NIM : 2120215310019
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 15 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Badrul A.
Badrul Aini
2120215310019

AINI, BADRUL. 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR USAHA KECIL DAN MIKRO. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Pembimbing Pendamping Dr. Suprpto, S.H., M.H., 101 Halaman.

RINGKASAN

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri pekerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.

Bentuk pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdiri atas: Upah minimum; struktur dan skala Upah; Upah kerja lembur; Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran Upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Oleh karena itu, alasan yang kuat untuk penulis membahas upah pekerja perempuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menentukan apakah ada perlindungan hukum untuk upah pekerja perempuan di Indonesia yang bekerja di sektor usaha kecil dan mikro.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa babak baru mengenai pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada tahun 2021 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Undang-Undang Cipta mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada tahun 2023, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah *reform-oriented research* yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan

hukum primer adalah terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis.

Pengaturan upah pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah tidak ada perbedaan dengan pembayaran upah terhadap pekerja/buruh laki-laki dalam pekerjaan yang sama. Hal tersebut berdasarkan prinsip yang diatur di dalam Konvensi ILO Nomor 100 tentang Kesetaraan Upah yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957. Perlindungan terhadap upah minimum pekerja perempuan yang bekerja di sektor Usaha Kecil dan Mikro secara normatif masih belum diberikan perlindungan hukum secara maksimal, oleh karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 bagi pekerja yang bekerja di sektor usaha mikro dan kecil, upah pekerja/buruh perempuan dikecualikan dari pembayaran upah berdasarkan upah minimum. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi pekerja perempuan yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminasi di tempat kerja

AINI, BADRUL. 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR USAHA KECIL DAN MIKRO. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Pembimbing Pendamping Dr. Suprpto, S.H., M.H., 101 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Usaha Kecil dan Mikro

Tujuan penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Perempuan yang Bekerja di Sektor Usaha Kecil dan Mikro” adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan upah pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan terhadap upah minimum pekerja perempuan yang bekerja di sektor Usaha Kecil dan Mikro.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pengaturan upah pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah tidak ada perbedaan dengan pembayaran upah terhadap pekerja/buruh laki-laki dalam pekerjaan yang sama. Hal tersebut berdasarkan prinsip yang diatur di dalam Konvensi ILO Nomor 100 tentang Kesetaraan Upah yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957. Kedua, Perlindungan terhadap upah minimum pekerja perempuan yang bekerja di sektor Usaha Kecil dan Mikro secara normatif masih belum diberikan perlindungan hukum secara maksimal, oleh karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 bagi pekerja yang bekerja di sektor usaha mikro dan kecil, upah pekerja/buruh perempuan dikecualikan dari pembayaran upah berdasarkan upah minimum. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi pekerja perempuan yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminasi di tempat kerja.

AINI, BADRUL. 2023. LEGAL PROTECTION OF WAGES FOR WOMEN WORKING IN THE SMALL AND MICRO BUSINESS SECTOR. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., and Advisor II: Dr.Suprpto, S.H., M.H., 102 Pages.

Keywords: legal Protection, Women Workers, Small and Micro Business Sector

The purpose of the thesis research entitled "Legal Protection of the Wages of Women Workers Working in the Small and Micro Enterprises Sector" is to find out and analyze the regulation of wages for women workers based on Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law and to find out and analyze the protection of the minimum wage for women workers working in the Small and Micro Enterprises sector.

The research results obtained are First, the regulation of wages for women workers based on Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to become Laws is that there is no difference in paying wages to male workers/laborers in the same job. This is based on the principle stipulated in the ILO Convention Number 100 concerning Equal Pay which has been ratified by Indonesia with Law Number 80 of 1957. Second, protection of the minimum wage for women workers who work in the Small and Micro Enterprises sector is normatively still not given maximum legal protection, because based on the provisions of Government Regulation Number 36 of 2021 for workers who work in the micro and small business sector, the wages of women workers/laborers are excluded from paying wages based on the minimum wage. This is of course very detrimental for women workers who are very vulnerable to discrimination in the workplace.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas segala anugerah dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR USAHA KECIL DAN MIKRO**. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tesis ini banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis di dalam penulisan Tesis ini.
4. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan

yang berhargabagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Bapak dan ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2021 Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ganjaran berupa pahala yang dilipatgandakan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan Tesis ini sampai selesai. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Hormat Penulis

Badrul Aini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS ..	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	41
F. Pertanggung Jawaban Sistematika Penelitian.....	44
BAB II PENGATURAN UPAH PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	46
A. Pengaturan mengenai Pekerja Perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	46
B. Pengaturan Upah Minimum Pekerja Perempuan Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	60
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP UPAH MINIMUM PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA DI SEKTOR USAHA KECIL DAN MIKRO.....	70

A. Kriteria Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	70
B. Upah Minimum Pekerja Perempuan di Sektor Usaha Kecil Dan Mikro.....	93
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

